

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH
DI KECAMATAN PEDURUNGAN**

Nyaiyu Madina Marvia Yusalima, Kismartini

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan
Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405 Laman:
www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of waste bank management policy in Pedurungan District, Semarang City, and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research informants include waste bank managers, sub-district government officials, and community members as customers. The analysis refers to Grindle's policy implementation theory, which emphasizes two aspects: the content of policy and the context of implementation. The findings indicate that the implementation of the waste bank policy in Pedurungan District has been carried out, but it has not yet been optimal. The lack of optimization is due to a gap between policy design and field conditions. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, insufficient funding, low public awareness and participation, and lack of government assistance. Nevertheless, supporting factors exist, such as regulations and the active role of waste bank managers. In conclusion, the waste bank policy contributes to reducing household waste but its effectiveness remains limited. The study recommends strengthening public socialization, increasing funding support, and enhancing collaboration among government, managers, and the community to make the program more effective and sustainable.

Keywords: *Implementation of Waste Bank Policy, Pedurungan District, Semarang*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengelola bank sampah, aparat pemerintah kecamatan, dan masyarakat sebagai nasabah. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, yang menekankan pada aspek isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan sudah berjalan, namun belum optimal. Belum optimalnya implementasi disebabkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi di lapangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dukungan pendanaan, rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, dan kurangnya pendampingan dari pemerintah. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti adanya regulasi dan peran aktif pengelola bank sampah. Kesimpulannya, kebijakan bank sampah berkontribusi dalam mengurangi sampah rumah tangga, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan dukungan pendanaan, serta kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Bank Sampah, Kecamatan Pedurungan, Semarang

PENDAHULUAN

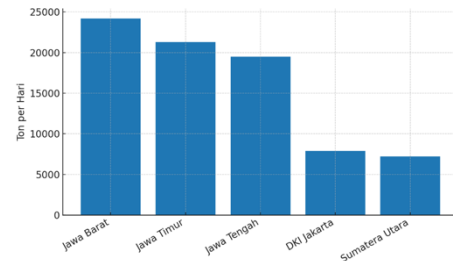
Isu pengelolaan sampah merupakan persoalan lingkungan global yang semakin krusial. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan urbanisasi memicu peningkatan volume sampah yang sulit dikendalikan. *World Bank* (Kaza et al., 2018) mencatat, jumlah sampah dunia mencapai 2,01 miliar ton pada 2016 dan diproyeksikan naik menjadi 3,40 miliar ton pada 2050. Lebih dari 90% sampah di negara berkembang masih ditangani secara tradisional melalui penimbunan terbuka, yang menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara. Hal ini menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola kebijakan.

Di Indonesia, persoalan sampah semakin kompleks. Data SIPSN KLHK (2024) mencatat timbulan sampah naik dari 19,56 juta ton pada 2023 menjadi 34,21 juta ton pada 2024, namun hanya 13,24% yang berhasil dikurangi dan 40,26% tidak terkelola. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi pengelolaan berbasis 3R yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 beserta turunannya dengan implementasi di lapangan yang masih jauh dari optimal.

Permasalahan persampahan di Indonesia masih menjadi isu krusial, terutama di kawasan perkotaan. Data SIPSN (2022) menunjukkan timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 36 juta ton per

tahun, sementara kapasitas pengelolaan masih terbatas.

Gambar 1. Grafik Timbulan Sampah Nasional Berdasarkan Provinsi

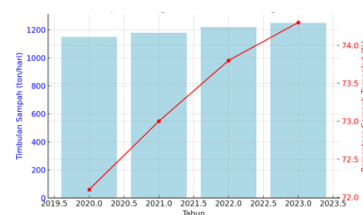


Sumber : SIPSN, (2024)

Tahun 2024, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tercatat sebagai penyumbang terbesar masing-masing 24.200 ton, 21.300 ton, dan 19.500 ton per hari, disusul DKI Jakarta (7.900 ton) dan Sumatera Utara (7.200 ton). Besarnya kontribusi Pulau Jawa tidak terlepas dari kepadatan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Indonesia terpusat di kawasan urban Jawa, sehingga kebijakan bank sampah perlu mempertimbangkan konteks lokal dan regional. Regulasi saja tidak cukup, diperlukan instrumen partisipatif berbasis masyarakat agar akumulasi sampah tidak menimbulkan krisis lingkungan, kesehatan, dan sosial.

Gambar 2. Grafik Timbulan dan Sampah Terangkut di Kota Semarang



Sumber : DLH, (2020-2023)

Data DLH Kota Semarang (2023)

menunjukkan timbunan sampah meningkat dari 1.150 ton per hari pada 2020 menjadi 1.250 ton per hari pada 2023. Persentase sampah yang berhasil terangkut ke TPA Jatibarang juga naik dari 72,1% menjadi 74,3%.

Namun, sekitar seperempat sampah masih belum tertangani, berpotensi menumpuk di TPS, mencemari lingkungan, dan menimbulkan risiko kesehatan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan dan kapasitas pengangkutan yang tersedia.

Gambar 3. Kondisi Penumpukan Sampah di TPA Jatibarang



Sumber : Detik.com/jateng

TPA Jatibarang menampung 800–950 ton sampah per hari sehingga daya tampungnya diperkirakan hanya bertahan beberapa tahun ke depan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengurangan dan pengolahan sampah dari hulu, sehingga solusi berbasis masyarakat seperti bank sampah menjadi semakin penting.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan berbasis ekonomi sirkular sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012. Kebijakan ini diperkuat

melalui Perda No. 6 Tahun 2012 tentang pemilahan sampah di sumber dan Perwal No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2023–2042 yang menargetkan “*zero waste to landfill*” pada 2040.

Pengelolaan sampah tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penanganan sampah membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu instrumen partisipatif yang efektif adalah program bank sampah.

Bank sampah, sesuai Permen LHK No. 14 Tahun 2021, berfungsi sebagai pusat pengumpulan sampah anorganik yang ditukar dengan saldo tabungan. Mekanisme ini memberi insentif ekonomi sekaligus pendidikan lingkungan, sehingga tidak hanya mengurangi beban TPA tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif warga untuk memilah sampah dari rumah.

Hingga akhir 2023 terdapat 497 unit bank sampah aktif di Kota Semarang, meningkat menjadi 664 unit pada pertengahan 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan percepatan pembentukan bank sampah di berbagai kecamatan, termasuk Pedurungan sebagai salah satu wilayah dengan jumlah terbanyak.

Meskipun jumlah bank sampah di Kota Semarang, termasuk Kecamatan Pedurungan, terus meningkat, implementasi

kebijakan belum optimal. Banyak unit menghadapi kendala operasional, manajerial, serta partisipasi masyarakat yang fluktuatif. Penelitian ini hadir untuk menelaah dinamika tersebut sekaligus menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Kendati hampir menjangkau seluruh kelurahan, bank sampah belum signifikan menekan volume sampah rumah tangga. Sebagian besar sampah tetap berakhir di TPA Jatibarang tanpa pemilahan optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program dalam mencapai tujuan pengurangan sampah dari sumbernya.

Fungsi bank sampah saat ini cenderung terbatas pada pemilahan dan penjualan kembali sampah anorganik ke pengepul. Inovasi produk daur ulang masih minim, umumnya berupa kerajinan sederhana dengan nilai jual rendah dan daya tarik pasar terbatas, sehingga peran bank sampah sebagai penggerak ekonomi sirkular belum maksimal.

Produk daur ulang seperti kerajinan tangan dari plastik menunjukkan upaya kreatif masyarakat, namun masih terbatas dari sisi variasi, daya tahan, dan nilai jual. Kondisi ini menggambarkan bahwa inovasi bank sampah di Semarang belum mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang kompetitif.

Kesenjangan ini sejalan dengan pandangan *Grindle* bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi isi dan konteks

implementasi. Di Semarang, gap juga terlihat antara target “zero waste to landfill” 2040 dengan capaian pengurangan sampah yang masih rendah, sejalan dengan teori *Van Meter dan Van Horn* tentang hambatan implementasi berupa sumber daya terbatas, lemahnya koordinasi, dan rendahnya dukungan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan menjadi penting. Kajian ini diharapkan memperkaya literatur tata kelola lingkungan berbasis masyarakat sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat peran bank sampah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Semarang.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Menurut *Grindle* (dalam Hidayatulloh & Mulyadi, 2015; Wibawa, 1994), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama:

a.) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. *Interest Affected*

Berbagai kepentingan yang memengaruhi jalannya kebijakan.

2. *Type of Benefits*

Jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi.

3. *Extent of Change Envisioned*

Sejauh mana perubahan yang ditargetkan.

4. *Site of Decision Making*

Ketepatan lokasi dan aktor pengambil keputusan.

5. *Program Implementer*

Kapasitas dan kompetensi pelaksana program.

6. *Resources Committed*

Ketersediaan sumber daya pendukung implementasi.

b.) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

1. *Power, Interest, and Strategy of Actors Involved*

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor.

2. *Institution and Regime Characteristics*

karakteristik lembaga dan rezim yang berperan.

3. *Compliance and Responsiveness*

Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana kebijakan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut *Van Meter dan Van Horn* (dalam Herabudin, 2022), terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kejelasan standar serta tujuan kebijakan diperlukan sebagai acuan dan ukuran capaian implementasi.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, maupun insentif pendukung.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antaraktor sangat penting agar

tujuan kebijakan tersampaikan dengan jelas, didukung mekanisme dan prosedur kelembagaan yang terstruktur.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kompetensi pelaksana, struktur hierarki, serta dukungan politik dalam organisasi formal maupun informal berpengaruh terhadap efektivitas implementasi.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi eksternal yang kondusif dapat mendorong keberhasilan, sedangkan lingkungan yang tidak mendukung berpotensi menghambat implementasi.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap, tanggapan, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Lokasi penelitian meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, beberapa unit bank sampah di Kecamatan Pedurungan, serta warga yang menjadi nasabah bank sampah. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari pejabat DLH, pengelola bank sampah, ketua RT/RW, dan masyarakat pengguna layanan bank sampah.

Data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*)

dan observasi lapangan, serta sumber sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bank sampah di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan dinilai berdasarkan kriteria implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang sudah dikerucutkan menjadi konteks bank sampah, yakni tujuan keberadaan bank sampah, implementor bank sampah, dan pelaksanaan bank sampah.

a. Tujuan Keberadaan Bank Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pertama program bank sampah di Kecamatan Pedurungan adalah mengurangi volume sampah rumah tangga. Upaya ini dijalankan melalui mekanisme pemilahan sejak dari sumber dan penyaluran sampah anorganik bernilai ekonomis. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa volume sampah yang langsung menuju TPSt

maupun TPA Jatibarang mulai berkurang, meskipun capaian ini masih bersifat bertahap dan belum maksimal. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak kecamatan menegaskan bahwa pengurangan timbulan sampah memang telah terlihat, namun masih membutuhkan konsistensi dan penguatan peran masyarakat agar dampaknya lebih signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program bank sampah mampu berkontribusi pada penekanan laju timbulan sampah, sekaligus mengurangi beban TPA yang selama ini menghadapi persoalan kelebihan kapasitas.

Tujuan kedua dari penyelenggaraan bank sampah adalah meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi secara teknis sebagai sarana pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan warga. Partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui keterlibatan dalam memilah sampah, menyerahkannya ke bank sampah, hingga mengikuti kegiatan sosialisasi. Penelitian menemukan bahwa tingkat partisipasi paling tinggi berasal dari kelompok tertentu seperti ibu-ibu PKK atau tokoh masyarakat, sedangkan sebagian warga lain masih terbatas partisipasinya karena faktor kesibukan atau rendahnya motivasi. Meski demikian, program ini berhasil menumbuhkan kebiasaan baru di masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, dengan indikator lingkungan yang lebih bersih dan meningkatnya praktik

pemilahan sampah rumah tangga. Dengan demikian, bank sampah berperan ganda sebagai media edukasi lingkungan sekaligus pendorong partisipasi sosial masyarakat.

Tujuan ketiga adalah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan bank sampah tidak hanya mendorong perilaku ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan nilai finansial yang dapat dirasakan warga. Sampah anorganik yang dipilah dapat ditabung, dijual kembali, atau dijadikan dasar untuk mendapatkan pinjaman berbasis sampah. Mekanisme ini menciptakan peluang tambahan pendapatan rumah tangga, walaupun jumlahnya relatif kecil. Bagi masyarakat menengah ke bawah, hasil ekonomi ini tetap penting karena mampu membantu kebutuhan sehari-hari. Selain itu, adanya tabungan berbasis sampah memberi motivasi bagi warga untuk berpartisipasi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa bank sampah tidak hanya sekadar instrumen teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bentuk inovasi ekonomi mikro yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan telah memberikan dampak positif pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Program ini terbukti menekan volume sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menghadirkan manfaat ekonomi bagi warga. Namun, pelaksanaan

di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan partisipasi yang belum merata, kurangnya inovasi dalam pengolahan sampah, serta dukungan kelembagaan dan sumber daya yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pengelola, pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, serta kolaborasi multipihak agar tujuan program bank sampah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

b. Implementor Bank Sampah

Keberhasilan implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan sangat dipengaruhi oleh peran implementor sebagai pelaksana utama di lapangan. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kondisi riil masyarakat, yang mencakup Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perangkat kecamatan dan kelurahan, RT/RW, kader lingkungan, serta komunitas pengelola bank sampah.

Dari sisi keterlibatan aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH berperan penting dalam penyusunan SOP, koordinasi lintas sektor, pelatihan, serta penyediaan sarana prasarana. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, perangkat pemerintah bertindak sebagai fasilitator, pembina, dan pengawas. Sementara itu, pengurus bank sampah di tingkat RT berperan langsung dalam operasional, mulai dari pemilahan, penimbangan, pencatatan, hingga pemberdayaan warga. Keterlibatan

masyarakat bersifat partisipatif, terutama melalui kelompok ibu-ibu PKK dan tokoh lokal, meski partisipasi masih belum merata. Selain itu, keberadaan pengepul turut memperlancar distribusi sampah daur ulang, sehingga operasional bank sampah lebih efisien. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antaraktor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari sisi komitmen pelaksana, terlihat adanya dedikasi tinggi di berbagai tingkatan. DLH menunjukkan komitmen kelembagaan melalui pendampingan teknis dan pelatihan. Pemerintah kecamatan tetap menjalankan pembinaan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, salah satunya melalui lomba bank sampah sebagai sarana evaluasi. Di tingkat RT/kelurahan, komitmen tercermin dari pengurus yang mengelola bank sampah secara sukarela tanpa mengutamakan imbalan materi, bahkan hasil kegiatan sering dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti tabungan warga atau sedekah sampah. Komitmen ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program lebih banyak ditopang oleh motivasi sosial dan rasa kebersamaan daripada faktor insentif ekonomi semata.

Secara keseluruhan, keterlibatan aktif dan komitmen implementor di berbagai level menjadi fondasi utama keberhasilan bank sampah di Pedurungan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan mitra swasta

membentuk mekanisme kolaboratif yang mampu memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

c. Pelaksanaan Bank Sampah

Pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan menunjukkan bahwa mekanisme operasional telah berjalan sederhana namun efektif. Proses dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga, penimbangan dan pencatatan sebagai tabungan, hingga penyaluran ke pengepul. Pola ini memungkinkan alur pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memberi kepastian nilai ekonomi bagi warga. Transparansi pencatatan menjadi faktor penting yang membangun kepercayaan masyarakat untuk terus berpartisipasi.

Dari sisi sarana dan prasarana, bank sampah telah memiliki peralatan dasar seperti timbangan, buku pencatatan, dan mesin pencacah plastik. Beberapa fasilitas tambahan diperoleh melalui program CSR, termasuk dropbox B3 dan alat pencacah. Namun, keterbatasan ruang penyimpanan masih menjadi kendala utama, karena tidak tersedianya gudang menghambat optimalisasi pemilahan dan peningkatan nilai jual sampah. Meski demikian, kemandirian warga dalam memanfaatkan fasilitas sederhana tetap menopang keberlanjutan operasional.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan program. Warga terlibat mulai dari memilah

sampah, menabung di bank sampah, hingga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti sedekah sampah. Meskipun tingkat partisipasi belum merata di semua wilayah, warga yang aktif merasakan manfaat nyata berupa lingkungan yang lebih bersih dan tambahan penghasilan. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran sosial dan lingkungan.

Monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan oleh DLH maupun kecamatan, namun pelaksanaannya masih bersifat insidental dan belum terstruktur. Evaluasi biasanya digabungkan dengan kegiatan sosialisasi atau pertemuan simbolis, sehingga belum menghasilkan rekomendasi teknis yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem evaluasi yang lebih rutin, menyeluruh, dan aplikatif agar mampu meningkatkan efektivitas program di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bank sampah di Pedurungan telah membawa dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan kesadaran sosial masyarakat. Meski menghadapi keterbatasan sarana, partisipasi yang belum merata, serta lemahnya sistem evaluasi, program ini terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan yang ditemukan dalam penelitian ini yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, sikap komitmen & implementor, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, dan ekonomi.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan bank sampah dipahami cukup baik oleh para pelaksana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi. DLH menekankan aspek ekonomi sirkular, sedangkan kecamatan melihatnya juga sebagai indikator sosial, kesehatan, bahkan politik. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan berupa partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya pengelolaan sampah organik.

Dari sisi konsistensi tujuan, kebijakan memiliki target jangka pendek berupa pengurangan volume sampah rumah tangga, target menengah berupa penguatan kelembagaan dan pemanfaatan hasil untuk kegiatan sosial-ekonomi, serta target jangka panjang berupa pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Arah kebijakan ini jelas dan terukur, tetapi capaian di tingkat kecamatan belum optimal karena masih

bergantung pada insentif ekonomi.

Dengan demikian, melalui indikator standar dan sasaran kebijakan dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan telah dirumuskan secara jelas, implementasinya belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan. Upaya penguatan partisipasi masyarakat, fasilitas teknis, dan kesadaran sosial-lingkungan diperlukan agar tujuan kebijakan bank sampah tercapai secara berkelanjutan.

b. Sumber Daya

Aspek sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi bank sampah di Kecamatan Pedurungan. Dari sisi sumber daya manusia, pengurus bank sampah sebagian besar bekerja secara sukarela dengan semangat sosial tinggi. Hal ini menjadi faktor pendukung karena menunjukkan adanya komitmen dan kepedulian warga. Namun, keterlibatan masih bergantung pada figur tertentu yang berperan sebagai penggerak, sehingga regenerasi pengurus dan keberlanjutan partisipasi menjadi kendala. Selain itu, keterbatasan tenaga pendamping dari DLH (hanya lima orang untuk lebih dari 800 bank sampah) menyebabkan sosialisasi dan monitoring belum berjalan optimal.

Dari aspek pendanaan, dukungan pemerintah tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, melainkan bantuan sarana

prasarana dan pembinaan. Pemerintah Kota Semarang juga memiliki program dana operasional sebesar Rp25 juta, meski pemanfaatannya terbatas. Di tingkat lokal, sumber dana utama berasal dari swadaya masyarakat dan hasil penjualan sampah. Ketergantungan pada pendanaan internal ini menunjukkan adanya kemandirian, tetapi juga mencerminkan keterbatasan anggaran rutin dan ketidakpastian bantuan eksternal.

Dari sisi sarana dan prasarana, bank sampah telah memiliki fasilitas dasar seperti timbangan, buku pencatatan, serta mesin pencacah plastik. Bantuan dari DLH maupun CSR turut memperkuat kapasitas operasional. Namun, keterbatasan gudang dan peralatan pemilahan masih menjadi hambatan utama karena berpengaruh langsung pada kualitas dan harga jual sampah. Kebutuhan fasilitas tambahan juga meningkat seiring munculnya jenis sampah baru, termasuk B3, yang belum terlayani dengan memadai.

Secara keseluruhan, ketersediaan sumber daya di Kecamatan Pedurungan menunjukkan adanya dukungan dasar yang cukup, tetapi belum sepenuhnya mampu menunjang efektivitas program. Jika dikaitkan dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, indikator sumber daya di sini memperlihatkan adanya kekuatan pada komitmen sosial masyarakat, tetapi kelemahan pada aspek kuantitas tenaga pendamping, fleksibilitas pendanaan, serta ketersediaan sarana teknis. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas

SDM, mekanisme insentif, serta dukungan fasilitas yang lebih berkelanjutan sangat diperlukan agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat tercapai secara optimal.

c. Sikap Komitmen & Implementor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor dalam program bank sampah di Kecamatan Pedurungan mencakup pengurus RT/kelurahan, warga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak kecamatan, serta pengepul. Pengurus dan warga berperan langsung dalam pelaksanaan teknis seperti penimbangan dan pencatatan, sedangkan DLH berperan pada perencanaan dan sosialisasi, serta kecamatan melalui pembinaan dan evaluasi. Pengepul berkontribusi pada distribusi hasil sehingga operasional lebih efisien. Faktor pendukung keterlibatan ini adalah adanya komitmen sosial pengurus, dukungan kebijakan, serta peran lintas aktor. Namun, hambatan tetap ada berupa kurangnya perencanaan formal, keterbatasan tenaga pendamping DLH, evaluasi yang belum berkesinambungan, serta fluktuasi harga sampah daur ulang yang memengaruhi motivasi masyarakat.

Dari sisi komitmen pelaksana, pengurus lokal menunjukkan keseriusan tinggi dengan semangat sosial yang menjaga keberlanjutan program meski minim insentif ekonomi. DLH berkomitmen melalui arah kebijakan jangka panjang berbasis ekonomi sirkular, namun keterbatasan SDM mengurangi

efektivitas pendampingan. Kecamatan turut menjaga konsistensi melalui monitoring dan evaluasi rutin, meski sifatnya masih insidental dan berbasis acara. Faktor pendukung komitmen adalah adanya dedikasi pengurus, arah kebijakan yang jelas, serta struktur pembinaan formal. Kendalanya adalah keterbatasan pendamping, ketergantungan pada figur penggerak lokal, dan pola evaluasi yang sporadis.

Secara keseluruhan, tingkat keterlibatan dan komitmen pelaksana cukup kuat, namun efektivitasnya belum maksimal karena dipengaruhi faktor struktural dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bank sampah sangat bergantung pada sinergi lintas aktor, penguatan perencanaan, serta mekanisme evaluasi yang lebih berkelanjutan.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan telah berjalan melalui jalur formal maupun non-formal. Di tingkat kelurahan, komunikasi dilakukan lewat pertemuan rutin, rapat RT/RW, serta media sosial, dengan kekuatan pada kedekatan sosial antara pengurus dan warga. Namun, hambatan muncul karena tidak semua warga aktif mengikuti sosialisasi maupun grup daring, sehingga informasi belum merata.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan

melalui komunikasi formal berupa sosialisasi, forum diskusi, dan surat edaran. Pola ini memberi legitimasi kebijakan, tetapi cenderung satu arah dan periodik, sehingga kurang responsif terhadap kendala teknis lapangan. Sementara itu, komunikasi di tingkat kecamatan dilakukan melalui pembinaan dan lomba bank sampah, yang mendukung koordinasi lintas wilayah, meski masih bersifat insidental dan berbasis acara.

Secara umum, komunikasi antarorganisasi sudah terbentuk dengan melibatkan pengurus, warga, DLH, dan kecamatan. Faktor pendukung utamanya adalah kedekatan sosial, legitimasi dari DLH, dan mekanisme evaluasi di tingkat kecamatan. Hambatannya adalah keterbatasan daya jangkauan sosialisasi, komunikasi yang belum konsisten, serta kecenderungan berbasis momentum. Sesuai teori Van Meter dan Van Horn, hal ini menunjukkan bahwa meski saluran komunikasi telah ada, konsistensi dan efektivitasnya masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan bank sampah dapat tercapai secara optimal.

e. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap implementasi bank sampah di Kecamatan Pedurungan. Kesadaran masyarakat masih bervariasi: sebagian warga mulai terbiasa memilah sampah berkat sosialisasi pemerintah dan

motivasi ekonomi, namun banyak yang masih pasif karena keterbatasan jangkauan sosialisasi, resistensi kebiasaan lama, dan rendahnya nilai ekonomi sampah. Faktor pendukung kesadaran adalah forum resmi DLH, komunikasi di tingkat RT/RW, serta manfaat ekonomi langsung dari tabungan sampah, sedangkan hambatannya adalah partisipasi yang fluktuatif dan ketergantungan pada insentif finansial.

Dari sisi budaya lokal, nilai gotong royong, kerja bakti, PKK, dan forum sosial masyarakat terbukti menjadi sarana efektif untuk mendorong partisipasi. Namun, budaya konsumtif masyarakat kota serta kebiasaan lama membuang sampah tanpa memilah masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, manfaat ekonomi terbukti menjadi faktor kunci yang menjaga keberlanjutan program. Tabungan sampah dan bantuan sarana prasarana mendorong partisipasi, tetapi keterbatasan dana operasional, ketergantungan swadaya, serta fluktuasi harga jual daur ulang sering melemahkan motivasi warga dan pengelola.

Jika dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, indikator lingkungan sosial dan ekonomi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi masyarakat. Ketergantungan pada insentif ekonomi membuat program rentan stagnasi, sehingga strategi ke depan perlu menyeimbangkan motivasi finansial

dengan peningkatan kesadaran lingkungan, inovasi produk daur ulang bernilai tambah, serta penguatan dukungan kelembagaan dan sosial-budaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Warga mulai terbiasa memilah dan menabung sampah anorganik, meski kontribusinya terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang masih terbatas. Kesenjangan dengan target *zero waste to landfill* 2040 tetap terlihat, karena kegiatan bank sampah masih dominan pada tahap pemilahan dan penjualan ke pengepul, belum berkembang pada inovasi produk daur ulang.

Faktor pendukung implementasi meliputi kejelasan tujuan kebijakan, komitmen pelaksana, serta dukungan sosial-ekonomi. Standar program yang jelas memudahkan pelaksanaan, partisipasi sukarela pengurus dan tokoh lokal memperkuat keberlanjutan, sementara budaya gotong royong dan insentif tabungan sampah menjadi pendorong utama keterlibatan masyarakat.

Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan dana operasional. Fluktuasi harga sampah daur ulang sering menurunkan

motivasi warga, dan komunikasi antarorganisasi belum konsisten sehingga sosialisasi dan monitoring tidak merata. Kondisi ini membuat efektivitas program masih sangat bergantung pada dukungan teknis dan struktural yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, implementasi bank sampah di Kecamatan Pedurungan cukup berhasil dalam aspek sosial, tetapi belum optimal secara teknis. Peningkatan sarana, kapasitas pengelola, dana berkelanjutan, serta inovasi produk daur ulang bernilai tambah perlu diperkuat. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta juga menjadi kunci agar bank sampah dapat berkembang menjadi pusat ekonomi sirkular yang mendukung target *zero waste to landfill* 2040.

SARAN

- a. Sosialisasi rutin dan pelatihan pemilahan sampah perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat bank sampah serta terdorong berpartisipasi aktif.
- b. Operasional bank sampah dapat berjalan lebih lancar jika didukung penambahan fasilitas penyimpanan, peralatan pemilahan, serta peningkatan jumlah tenaga pengelola.
- c. Partisipasi warga dapat diperkuat melalui insentif yang lebih menarik, baik berupa harga jual sampah yang kompetitif maupun penghargaan bagi mereka yang konsisten terlibat.

- d. Komunikasi antarwarga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan DLH perlu diperkuat agar informasi terkait prosedur, target, dan capaian program lebih jelas serta mengurangi miskomunikasi.
- e. Kegiatan seperti kampanye kebersihan, lomba lingkungan bersih, dan forum komunitas dapat menumbuhkan budaya sadar lingkungan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat.
- f. Bank sampah perlu mengembangkan produk daur ulang bernilai tambah dengan dukungan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar agar mampu berkontribusi pada penguatan ekonomi sirkular di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M., & Anto, R. P. (2018). A study policy implementation of waste management in Konawe Regency-Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 11(1), 1–90.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS Indonesia.
- Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste Bank Policy Implementation through Collaborative Approach: Comparative Study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su14137974>
- Febriyanti, R. (2017). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Studi pada Program Bank Sampah di Kota Semarang* [Undergraduate Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). *What a waste: a global review of solid waste management*. World Bank.
- Kasmad, R. (2013). *Studi implementasi kebijakan publik*. Kedai Aksara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*.
- Subekti, S. (2010). *Pengelolaan sampah rumah tangga 3R berbasis masyarakat. Prosiding Sains Nasional Dan Teknologi*.
- Verawati, S., & Tuti, R. W. D. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 10(2), 118–126. <https://doi.org/10.31289/jap.v10i2.3107>
- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik*. Intermedia Jakarta.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Woll, C. (2019). Corporate power beyond lobbying. *American Affairs*, 3(3), 38–55.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>

